



## **Pengembangan Kompetensi Mahasiswa Magang Melalui Kegiatan Pembelajaran Praktik Hukum Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah**

**Riri Anggriani<sup>1\*</sup>, Moh. Fierzha Putra Wardhana<sup>2</sup>, Abdul Syukur Ismuhi<sup>3</sup>, La ode Arsai Muhammad<sup>4</sup>**

<sup>1-4</sup> Ilmu Hukum, Universitas Tadulako

<sup>1</sup>[ririin.ra@gmail.com](mailto:ririin.ra@gmail.com), <sup>2</sup>[fierzhapw@gmail.com](mailto:fierzhapw@gmail.com), <sup>3</sup>[abdulsyukurismuhu237@gmail.com](mailto:abdulsyukurismuhu237@gmail.com), <sup>4</sup>[laodearsaimuhammad@gmail.com](mailto:laodearsaimuhammad@gmail.com)

### **Abstrak**

Program magang, salah satu jenis pengabdian kepada masyarakat, membantu menghubungkan antara pembelajaran teoritis di perguruan tinggi dan praktik kerja di lapangan. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menjelaskan bagaimana program magang mahasiswa hukum dijalankan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dan bagaimana program ini berdampak pada peningkatan kemampuan mahasiswa dalam praktik hukum. Selama magang, pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan, dengan observasi langsung dan wawancara digunakan. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa siswa memperoleh keterampilan yang lebih baik baik dalam kemampuan keras maupun halus. Ini termasuk pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana sistem kerja kejaksaan bekerja, keterampilan administrasi hukum yang lebih baik, kemampuan untuk menulis dan menganalisis dokumen hukum, dan peningkatan moral dan sikap profesional. Selain itu, kehadiran mahasiswa magang meningkatkan pelayanan publik dan administrasi di Kejaksaan Tinggi. Dengan demikian, program magang ini membantu mahasiswa belajar praktik hukum dan menjadikan kejaksaan sebagai mitra pengabdian Masyarakat

**Kata Kunci:** Magang Mahasiswa-1, Pengabdian Masyarakat-2, Kompetensi Hukum-3, Praktik Hukum-4, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah-5

### **PENDAHULUAN**

Magang adalah salah satu cara praktis untuk menerapkan kurikulum pendidikan tinggi, yang bertujuan menghubungkan teori dari bangku kuliah dengan kenyataan di dunia kerja. Khususnya di bidang hukum, magang sangat penting untuk membangun kemampuan profesional mahasiswa, sehingga mereka bisa memahami sistem peradilan, prosedur administrasi hukum, dan etika profesi yang berlaku secara mendalam. Lewat kegiatan ini, mahasiswa tidak cuma belajar teori, tapi juga langsung merasakan bagaimana hukum ditegakkan oleh lembaga seperti Kejaksaan Tinggi.

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah selalu terbuka untuk mahasiswa yang ingin belajar hukum secara praktis di berbagai bidang kerja. Dalam program magang, mahasiswa tidak terjebak di satu bagian saja; mereka bisa ikut serta dan belajar dari aktivitas di bidang Pidana Umum, Pidana Khusus, dan Perdata dan Tata usaha negara. Tiap bidang punya pengalaman unik, misalnya memahami langkah-langkah penyelidikan dan edukasi hukum, melihat langsung bagaimana kasus pidana ditangani, belajar membuat pendapat hukum atau memberikan bantuan hukum, serta mengamati proses pengawasan internal. Dengan terlibat di berbagai unit, mahasiswa mendapat gambaran lengkap tentang tugas kejaksaan sesuai dengan ketentuan perundang undangan, yang pada akhirnya membantu mereka mengasah kemampuan analisis, keterampilan praktis, dan sikap profesional sebagai calon ahli hukum.

Walaupun mahasiswa hukum sudah banyak belajar teori selama kuliah, seringkali mereka masih kesulitan memahami bagaimana hukum bekerja di lapangan. Banyak yang belum paham prosedur kerja kejaksaan, dokumen hukum yang dipakai, cara menangani kasus, atau etika dan budaya kerja di sana. Plus, kesempatan untuk melihat proses di bidang seperti Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata, dan Hukum Administrasi Negara masih jarang, jadi pemahaman mereka tentang peran kejaksaan jadi kurang utuh. Ini menunjukkan ada gap besar antara teori di kampus dan praktik di kejaksaan. Karena itu, program magang yang terstruktur dan menyeluruh sangat diperlukan untuk menutup gap ini. Artikel pengabdian masyarakat ini pun membahas bagaimana magang di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dirancang dan dijalankan, serta kontribusinya dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa di bidang praktik hukum, sehingga bisa jadi model pembelajaran efektif untuk program hukum atau lembaga pemerintah lain.

### **METODE**

Dalam kegiatan program magang ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif. Metodologi penelitian kualitatif berfokus dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menguraikan serta memahami secara komprehensif pengalaman mahasiswa selama mengikuti kegiatan magang akademik yang dilaksanakan oleh MBKM, terutama berkaitan dengan pelaksanaan tugas tugas administrative dan struktur dalam lingkungan birokrasi pemerintahan.

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara utama, yaitu observasi langsung dan wawancara. Observasi dilakukan secara terus-menerus selama mahasiswa menjalani magang, dengan tujuan mengamati secara rapi aktivitas sehari-hari, cara kerja pegawai, proses pengelolaan berkas, serta peran mahasiswa dalam mendukung tugas-tugas tersebut. Selain itu, wawancara dilakukan kepada sejumlah pegawai untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai peran, tantangan, dan pengalaman mereka selama bekerja di lingkungan birokrasi. Pendekatan ini membantu peneliti memahami lebih jelas situasi di lapangan, terutama dalam melihat bagaimana mahasiswa beradaptasi, berkontribusi, dan belajar dalam lingkungan pemerintahan yang formal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejaksaan Tinggi (Kejati) adalah sebuah lembaga negara yang berada di setiap daerah hukum. Kejaksaan Tinggi merupakan lembaga hukum yang memiliki kewenangan dalam melakukn penuntutan, dan seluruhnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Umumnya, Kejaksaan Tinggi berada di kota utama provinsi dan meliputi wilayah hukum yang mencakup seluruh area kekuasaan provinsi tersebut. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang bertugas mengendalikan pelaksanaan tugas serta wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.

Pendidikan praktis dalam bentuk magang memiliki dampak signifikan dalam membekali mahasiswa dengan keterampilan praktis dan teknis. Magang memungkinkan mahasiswa untuk mengintegrasikan teori yang telah dipelajari di kelas dengan pengalaman langsung di lapangan. Dalam konteks hukum, Arifin menekankan bahwa keterampilan seperti analisis kasus, negosiasi, dan komunikasi dengan klien menjadi lebih terasah melalui pengalaman langsung. Dalam dunia hukum, pengalaman praktis tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga keterampilan interpersonal. Program magang memiliki istilah lain yang sering disebut sebagai internship. Program ini merupakan bentuk pengembangan kompetensi yang dimiliki individu agar siap memasuki dunia kerja sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Program magang biasanya banyak ditawarkan kepada mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan sebagai bentuk pengenalan terhadap lingkungan kerja dan juga Peningkatan terhadap soft skill mahasiswa.

Soft Skill sudah menjadi salah satu faktor utama yang diperhatikan ketika bekerja di berbagai instansi dan perusahaan. Tidak terkecuali pada mahasiswa setelah lulus dari universitas nantinya. Soft skill menjadi tolak ukur dari keterampilan dan kemampuan seseorang ketika bekerja di berbagai instansi. Dunia kerja saat ini, 15% keberhasilan ditetapkan dari kadermidan keterampilan teknis (hard skill) dan 85% keterampilan lunak (soft skill) didalam mengatur diri yang bersangkutan dan orang lain. Hal ini samaakansurvei yang dilaksanakan Pusat Kurikulum DEPDIKNAS yang memberikan pernyataan dimanakunci sukses yaitu 80% soft skill dan 20% hard skill.

Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa program magang mahasiswa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah memberikan dampak positif yang signifikan dalam berbagai aspek, termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan kompetensi mahasiswa, serta penguatan sinergi antara dunia pendidikan dan institusi pemerintah. Dalam aspek operasional, mahasiswa magang berperan dalam meningkatkan efisiensi administrasi. Mereka mendukung kegiatan administratif seperti Penyusunan surat, pengelolaan dokumen, digitalisasi arsip, digitalisasi berkas hingga penyusunan laporan, yang meringankan beban kerja staf Kejaksaan. Hal ini memungkinkan pegawai untuk lebih fokus pada tugas utama yang memerlukan keahlian khusus. Selain itu, pengembangan kompetensi mahasiswa magang pada kejaksaan tinggi Sulawesi Tengah meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap sistem kerja kejaksaan, serta mekanisme penanganan perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku pada kantor kejaksaan itu sendiri.

Selain itu juga mahasiswa mendapatkan kompetensi teknis di bidang administrasi hukum, seperti penyusunan dan pengelolaan dokumen perkara, dan juga mampu Menyusun karya ilmiah hukum yang sistematis, argumentatif, dan orisinal seperti pembuatan telaah Pendampingan/Pendapat hukum. Pengalaman ini melatih kedisiplinan, serta kemampuan mahasiswa dalam bekerja secara sistematis dan sesuai standar operasional yang di terapkan di lingkungan kejaksaan.

Kegiatan magang ini memberikan kesempatan penting bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman di beberapa bidang di Kejaksaan Tinggi. Terdapat tiga bidang utama yang menjadi tempat mahasiswa belajar, yaitu Pidana Umum (Pidum), Pidana Khusus (Pidsus), dan Perdata serta Tata Usaha Negara (Datun). Meskipun setiap bidang memiliki ciri dan tugas yang berbeda, semuanya saling membantu dan melengkapi satu sama lain.

Bidang PIDUM pada Kejaksaan Tinggi merupakan unsur pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Bidang ini memiliki tugas dan fungsi dalam penanganan perkara tindak pidana umum pada tingkat kejaksaan tinggi, baik melalui koordinasi, pembinaan, maupun pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan perkara pidana umum di wilayah hukumnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Bidang Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi melaksanakan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap Kejaksaan Negeri dalam penanganan perkara pidana umum, serta menangani perkara tertentu sesuai kewenangannya. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang tentang Kejaksaan.

Pada tahap pra-penuntutan, Bidang Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap proses penelitian berkas perkara pidana umum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri. Kegiatan ini meliputi evaluasi kelengkapan administrasi perkara, pemantauan penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), serta pengawasan atas pemberian petunjuk kepada penyidik melalui surat P-19 hingga diterbitkannya surat P-21.

Dalam tahap penuntutan, Bidang Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi melakukan pembinaan teknis terhadap Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri, termasuk evaluasi penyusunan surat dakwaan dan pelaksanaan penuntutan



di persidangan. Selain itu, Kejaksaan Tinggi dapat melaksanakan penuntutan secara langsung terhadap perkara tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht), Bidang Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri. Di samping itu, bidang ini juga menjalankan fungsi administrasi penanganan perkara pidana umum, meliputi pengelolaan surat-menyurat, pelaporan, dan pengarsipan perkara pada tingkat Kejaksaan Tinggi. Dengan demikian, Bidang Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi berperan penting dalam menjamin keseragaman penerapan hukum, tertib administrasi penuntutan, serta efektivitas penegakan hukum pidana umum di wilayah hukumnya.

Bidang DATUN mewakili negara dan pemerintah dalam kasus hukum perdata dan tata usaha negara. Menurut Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan, hakim memiliki otoritas untuk bertindak atas nama negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Selain itu, menurut Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan diberi wewenang untuk menyelamatkan, memulihkan, atau memperbaiki undang-undang dalam bidang Perdatadan Tata Usaha Negara. kegiatan Penyusunan Telaah Pendapat Hukum (*LO*) dan Telaah Pendampingan Hukum (*LA*) ini memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai peran Jaksa Pengacara Negara dalam menjaga kepentingan Publik

Selama magang, mahasiswa membantu membuat telaah pendampingan hukum/*Legal Assistance (LA)* dan juga membuat telaah pendapat hukum/*Legal Opinion (LO)*, serta mahasiswa juga dapat memahami bagaimana Jaksa Menyusun Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) dan juga mempelajari bagaimana menangani surat-menyurat administrasi seperti pembuatan Laporan Bulanan Kegiatan Bidang Datun, Laporan Pengendalian Inflasi Daerah, Notulen, Digitalisasi arsip, dan persuratan lainnya

Bidang Pidana Khusus (PIDSUS) di Kejaksaan Tinggi (Kejati) bertugas menangani perkara pidana di luar KUHP seperti korupsi, TPPU, perpajakan, kepabeanan, dan pelanggaran berat lain yang memerlukan penanganan khusus, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga eksekusi, dengan fungsi membimbing, mengendalikan, dan mengawasi penanganan kasus di Kejaksaan Negeri (Kejari) wilayah hukumnya, serta merumuskan kebijakan teknis dan administrasi Pidsus. Seperti :

1. **Penanganan Perkara:** Melaksanakan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, dan eksekusi perkara tindak pidana khusus (korupsi, TPPU, pajak, kepabeanan, dll.).
2. **Koordinasi & Pengawasan:** Memberikan bimbingan, pengendalian, dan supervisi teknis kepada Kejari dalam penanganan perkara Pidsus, serta koordinasi dengan instansi terkait.
3. **Perumusan Kebijakan:** Menyusun kebijakan teknis dan administratif untuk penanganan perkara Pidsus.
4. **Pengelolaan Data & Laporan:** Menghimpun, mengolah data, dan menyusun statistik kriminal serta laporan terkait perkara Pidsus.
5. **Upaya Hukum:** Menangani praperadilan, upaya hukum (banding, kasasi, PK), dan eksaminasi (penelaahan) terhadap perkara Pidsus.
6. **Eksekusi & Pengawasan Putusan:** Melaksanakan penetapan hakim, putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, serta mengawasi pelaksanaan pidana bersyarat dan lepas bersyarat.
7. **Pelacakan Aset:** Melakukan pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti dalam perkara Pidsus.

Selama magang mahasiswa membantu untuk melakukan penjemputan dan pengawalan tahanan untuk keperluan proses pemeriksaan, penyidikan dan persidangan, membantu untuk melakukan penyusunan dan pengelolaan daftar berkas administrasi perkara tersangka dengan cermat dan terstruktur, membuat dan merevisi bahan ekspose perkara, melakukan kegiatan penelaahan terhadap berkas perkara, memeriksa kelengkapan barang bukti dalam berkas perkara dengan mencocokkannya pada buku daftar perkara, membuat P-39 atau laporan hasil persidangan dugaan tindak pidana pencucian uang dan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana dan aset daerah, membuat pidsus-10 tanda terima data/dokumen/benda, menginput surat ke dalam buku Register Perkara (RP-4), Membuat Surat Panggilan Saksi (P-9) dan bantuan pemanggilan saksi dugaan perkara tindak pidana korupsi, surat pengembalian berkas perkara (P-19), dan surat pelimpahan berkas perkara (P-31), Membuat BA-6 ( Berita Acara Penitipan Barang Bukti perkara dugaan tindak pidana korupsi dan membuat BA-15 (berita acara pelaksanaan penetapan hakim terkait barang sitaan) dan beberapa pengadministrasian lainnya.

#### Gambar



Gambar 1  
Bidang Pidum  
mengerjakan P19



Gambar 2  
Bidang Datun  
Pembuatan Telaahan



Gambar 3  
Bidang Pidsus  
Pengarsipan Dokumen Sitaan



Dalam bidang pendidikan hukum, selain pemahaman teori, peningkatan keterampilan praktis sangatlah krusial. Keterampilan ini menjadi dasar bagi mahasiswa agar siap menghadapi tantangan di dunia profesional yang nyata. Salah satu cara yang dikenal untuk mengasah keterampilan ini adalah melalui program magang di lembaga hukum, seperti kejaksaan Tinggi. Program magang memberikan peluang bagi mahasiswa untuk terlibat langsung dalam kegiatan hukum sehari-hari, yang tidak hanya memperdalam pemahaman teoretis tetapi juga meningkatkan keterampilan praktis mereka.

Magang juga memainkan peran penting dalam memperdalam pemahaman mahasiswa tentang etika profesi dan prosedur hukum. Mereka belajar tentang bagaimana menjalankan tugas hukum dengan mengikuti proses penanganan perkara yang dilakukan oleh para Jaksa, mulai dari menerima laporan, memeriksa berkas, hingga memberikan pendapat hukum. Di meja kerja maupun saat mendampingi Jaksa di lapangan, mahasiswa dapat mengamati bagaimana aparatur kejaksaan menjaga kerahasiaan informasi, bersikap profesional kepada para pihak, dan mematuhi standar operasional yang berlaku..

## **KESIMPULAN**

Program magang mahasiswa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah merupakan wujud pengabdian kepada masyarakat yang sangat efektif untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa hukum melalui pengalaman praktis langsung. Kegiatan ini berhasil menghubungkan teori hukum yang dipelajari di kampus dengan penerapan nyata di dunia penegakan hukum di lingkungan kejaksaan. Dengan terlibat dalam bidang Pidana Umum, Pidana Khusus, serta Perdata dan Tata Usaha Negara, mahasiswa mendapatkan wawasan mendalam tentang cara kerja kejaksaan, langkah-langkah menangani perkara, dan administrasi hukum yang berlaku.

Selain itu, program ini tidak hanya membangun keterampilan teknis seperti penyusunan dokumen hukum, analisis pendapat, pendampingan hukum, serta pengelolaan administrasi perkara, tetapi juga mengembangkan keterampilan interpersonal mahasiswa, termasuk disiplin, tanggung jawab, komunikasi, kerjasama, dan etika profesi hukum. Di samping itu, kehadiran mahasiswa magang memberikan manfaat positif bagi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dengan membantu kelancaran pekerjaan administrasi dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, program magang di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah bisa dijadikan sebagai contoh model pembelajaran praktis hukum yang berkesinambungan dan kolaboratif antara universitas dan institusi penegak hukum. Program ini diharapkan terus diperbaiki secara sistematis agar dapat mencetak lulusan hukum yang tidak hanya cemerlang dalam bidang akademik, tetapi juga siap menghadapi tantangan dunia kerja dan memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah yang telah memberikan kesempatan, bimbingan, serta dukungan penuh kepada mahasiswa selama pelaksanaan program magang sebagai bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para Jaksa dan seluruh pegawai di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah yang telah berkenan membimbing, mengarahkan, dan berbagi pengalaman praktik hukum secara langsung kepada mahasiswa.

Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak perguruan tinggi, khususnya dosen pembimbing lapangan dan dosen pembimbing akademik, atas arahan, pendampingan, serta dukungan selama pelaksanaan kegiatan magang hingga penyusunan artikel ini. Tidak lupa, apresiasi juga disampaikan kepada seluruh mahasiswa peserta magang yang telah berpartisipasi aktif, menunjukkan sikap profesional, dan berkontribusi dalam mendukung kelancaran kegiatan di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak tersebut menjadi faktor penting dalam terlaksananya kegiatan pengabdian ini dengan baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afrilia, C., Anggusti, M., & Panjaitan, Y. T. R. (2024). Kontribusi Magang Terhadap Pengembangan Ketrampilan Hukum (Studi Kasus Di Kantor Pengacara Tri Wira Justitia). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 7(2), 634-640. <https://doi.org/10.34007/jehss.v7i2.2417>
- Febrianti, O., Afrinaldi, R., Saputra, A. E., Sanjaya, S. A., Jelita, Y., Iryanti, I., & Shilvircihiyanti. (2025). Peningkatan Kompetensi Hukum Mahasiswa Melalui Kegiatan Magang di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. *Mandala Bakti: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 148-157.
- Fernando, Y. (2023). Tindak Pidana Umum dan Khusus dalam Asas dan Teori serta Doktrin Hukum Pidana.
- Harisda, Wajdi, M. F., Sara, A., Riskawati, Mutta, R., Attabahir, N. D., & Hasdiana. (2025). Kontribusi Mahasiswa Magang Sebagai Bagian dari Penguatan Pelayanan Publik di Kejaksaan Negeri Parepare. *Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 264-269. <https://doi.org/10.61722/japm.v3i1.3768>
- Hutapea, A. O. P., & Nainggolan, O. (2025). Peranan Bidang DATUN dalam Memberi Pendampingan Hukum Tentang Ganti Rugi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Studi Kejaksaan Tinggi Sumatera



- Utara). *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(1), 1-11. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2255>
- Kejaksaan Tinggi. (2024). *Wikipedia Bahasa Indonesia*. Diakses pada 8 Desember 2025, dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan\\_Tinggi](https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Tinggi)
- Mulyaningsih, M. & Kadarusman, A. (2020). Implementasi Kebijakan Penyidikan Tindak Pidana Umum terhadap Manajemen Penyidikan Kasus Tindak Pidana Umum dalam Mewujudkan Kinerja Penyidik di Satuan Reserse dan Kriminal Polres Garut.
- McNamara, J. (2009). Internships: Effective Work Integrated Learning for Law Students. *Asia-Pacific Journal of Cooperative Education*, 10(3), 229-240.
- Raudhatina, R., & Widagdo, H. H. (2025). *Analisis pengalaman mahasiswa dalam memahami proses birokrasi melalui magang di Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah*. Gudang Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(2), 373–379. <https://doi.org/10.59435/gjpm.v3i2.1635>
- Saputri, A. H. (2020). Penerapan E-Court dalam Perkara Tindak Pidana Umum dalam Perspektif Hukum Progresif.
- Sugraini, T., & Cerya, E. (2023). Pengaruh Persepsi Mahasiswa terkait Proses Pembelajaran dan Praktek Pelaksanaan Magang Terhadap Pengembangan Soft Skill Mahasiswa Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Padang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 17947-17954.
- Ufia, S., Nugroho, A. D., & Wahjoedi, T. (2024). Meningkatkan Kompetensi Mahasiswa melalui Program Magang Sebagai Upaya Peningkatan Hard Skill dan Soft Skill. *Journal of Knowledge and Collaboration*, 1(1), 39-47.
- Wulandari, A. A. A. S., & Dewi, G. A. A. P. (2024). Perlindungan Hukum serta Hak-Hak Mahasiswa Magang Program Kampus Merdeka dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. *Jurnal Kertha Wicara*, 13(12), 613-622.
- Yulindo, R. (2022). *Penerapan Public Relations Selama Masa Pandemi COVID-19 Pada Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat* [Tugas Akhir]. Diploma Ekonomi, Universitas Andalas.

